



INDONESIA INDICATOR

LAPORAN MEDIA CETAK

**Pj. Gubernur Jawa Tengah
Komjen Pol (Purn) Drs. Nana Sudjana A.S., M.M
(06 Januari 2025)**

Summary

Media	News	Positive	Neutral	Negative
2	2	1	0	1

Daily Statistic

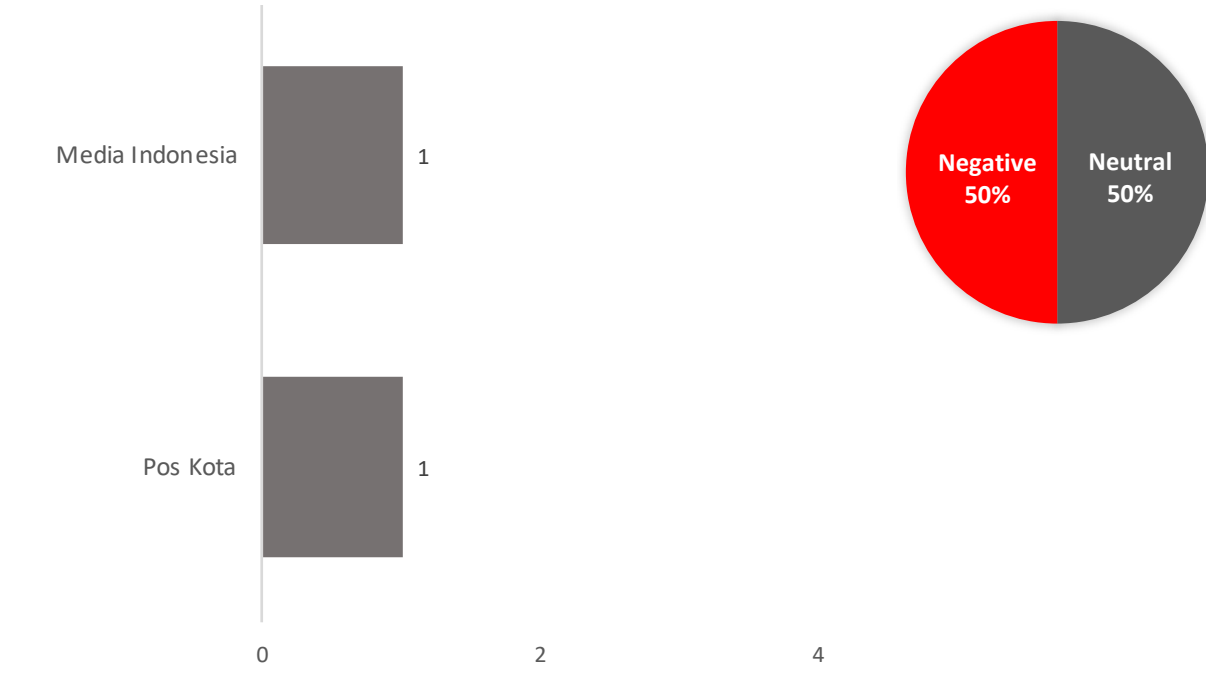


Table Of Contents : 06 Januari 2025

No	Date	Media	News Title	Page	Sentiment	Influencers
1	06 Januari 2025	Media Indonesia	Ada Kasus PMK, Pasar Hewan Dimbau Tutup 14 Hari	8	Negative	
2	06 Januari 2025	Pos Kota	Luthfi Yasin Resmi Daftar Jadi Pihak Terkait	12	Neutral	Heru Widodo

Title	Ada Kasus PMK, Pasar Hewan Dimmbau Tutup 14 Hari		
Media	Media Indonesia	Reporter	FL/AT/AS/N-2
Date	2025-01-06	Tone	Negative
Page	8	PR Value	
Summary	<p>Kasus PMK di Jawa Tengah kian meluas dan jumlah ternak terpapar dan mati makin meningkat. Karena itu, Pemprov Jawa Tengah mulai melakukan percepatan vaksinasi dan pencegahan dengan menghentikan pengiriman ternak dari sejumlah daerah.</p> <ul style="list-style-type: none">- Menurut Kepala Pelaksana Tugas (Plt) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Jawa Tengah Ignasiun Haryanta Nugraha, pihaknya telah mendistribusikan 8.750 dosis vaksin yang tersedia ke sejumlah daerah rawan PMK. Bahkan Pemkab Wonogiri telah menutup pasar hewan untuk memutus mata rantai penyebaran PMK.- Bupati Wonogiri Joko Sutopo mengatakan sebanyak 17 pasar hewan telah ditutup meski pihak pemkab telah berhasil menyembuhkan 236 sapi dari 310 ekor yang terjangkit PMK. Saat ini sudah 57 sapi milik peternak Wonogiri mati akibat penyakit itu. Bupati Joko sudah membuat SE (surat edaran) penutupan seluruh pasar hewan, yang berlaku efektif mulai akhir pekan hingga Januari mendatang.		

Ada Kasus PMK, Pasar Hewan Diimmbau Tutup 14 Hari

Pemkab Wonogiri menutup 17 pasar hewan demi memutus mata rantai penyebaran penyakit mulut dan kuku.

WIDJAJADI
widjajadi@mediaindonesia.com

KEMENTERIAN Pertanian (Kementan) mengimbau pemerintah daerah menutup sementara pasar hewan selama 14 hari jika ditemukan adanya kasus penyakit mulut dan kuku (PMK) di wilayah masing-masing. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementan Agung Suganda dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (5/1), mengatakan bahwa melalui Surat Menteri Pertanian Nomor B-03/PK.320/M/01/2025 tertanggal 3 Januari 2025, Kementan terus mengingat-

kan bahwa peningkatan kasus PMK yang terjadi pada Desember 2024 harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah. Dalam surat tersebut, Kementan menyarankan beberapa langkah antisipatif kepada pemerintah daerah. Pertama, memperkuat pengawasan terhadap lalu lintas hewan, produk hewan, dan media pembawa penyakit. Kedua, menutup pasar hewan selama 14 hari jika ditemukan kasus PMK di wilayah tersebut, yang harus disertai pembersihan dan disinfeksi pasar. Ketiga, memaksimalkan peran peternak dan sektor swasta dalam mengendalikan penyakit di tingkat daerah. "Penutupan

pasar hewan yang terpapar virus dan tindakan disinfeksi adalah langkah mendesak untuk menghentikan penyebaran PMK. Pemerintah daerah harus sigap melindungi peternak dari kerugian yang lebih besar," ujar Agung. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menangani ancaman penyakit. Sinergi lintas sektor sangat penting untuk menjaga populasi ternak dan keberlanjutan usaha peternakan. Selain itu, Kementan juga menekankan pentingnya pelaporan kasus PMK atau penyakit lainnya melalui ISIKHNAS, Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional. Peternak didorong untuk segera melaporkan dugaan kasus melalui platform ini demi mempercepat penanganan. "Melalui pelaporan ini, tim kesehatan hewan dapat segera

melakukan penyidikan dan pengobatan pada ternak yang sakit," ujar Agung. **Wonogiri** Kasus PMK di Jawa Tengah kian meluas dan jumlah ternak terpapar dan mati makin meningkat. Karena itu, Pemprov Jateng mulai melakukan percepatan vaksinasi dan pencegahan dengan menghentikan pengiriman ternak dari sejumlah daerah. Menurut Kepala Pelaksana Tugas (Plt) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Jateng Ignasiun Haryanta Nugraha, pihaknya telah mendistribusikan 8.750 dosis vaksin yang tersedia ke sejumlah daerah rawan PMK. Bahkan Pemkab Wonogiri telah menutup pasar hewan untuk memutus mata rantai penyebaran PMK. Bupati Wonogiri Joko Sutopo mengatakan sebanyak 17 pasar hewan telah

ditutup meski pihak pemkab telah berhasil menyembuhkan 236 sapi dari 310 ekor yang terjangkit PMK. Saat ini sudah 57 sapi milik peternak Wonogiri mati akibat penyakit itu. "Yang terjadi di Wonogiri ini sudah KLB, ada setidaknya 310 sapi terinfeksi PMK dan menyebar di 25 kecamatan. Jadi tidak main-main. Kami tidak ingin peternak sapi di wilayah saya babak belur karena ada penularan dari luar," kata dia. Karena itu, langkah strategis untuk melindungi populasi sapi Wonogiri yang mencapai 170 ribu ekor ialah memutus mata rantai dari luar. Bupati Joko sudah membuat SE (surat edaran) penutupan seluruh pasar hewan, yang berlaku efektif mulai akhir pekan hingga 9 Januari mendatang. Namun, langkah berbeda ditempuh Pemprov Jawa Timur, yang tidak akan menutup pasar hewan, apalagi sampai 14 hari. "Nanti disesuaikan di tiap-tiap pemkab, tapi Jatim belum perlu," kata Penjabat Gubernur Jatim Adhy Karyono di Surabaya, kemarin. Di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), selain pengobatan, *biosecurity* juga dilakukan agar PMK tidak menyebar ke sapi-sapi yang lain. "Kami juga menggiatkan vaksinasi," terang Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) DIY Syam Arjayanti. (FL/AT/AS/N-2)

Title	Luthfi Yasin Resmi Daftar Jadi Pihak Terkait		
Media	Pos Kota	Reporter	ham
Date	2025-01-06	Tone	Neutral
Page	12	PR Value	
Summary	<p>Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah nomor urut 2 Ahmad Luthfi-Taj Yasin mendaftarkan permohonan sebagai pihak terkait ke Mahkamah Konstitusi (MK) Langkah ini terkait gugatan hasil Pilkada 2024 yang diajukan pasangan calon Andika Perkasa-Hendrar Prihadi (Hendi).</p> <ul style="list-style-type: none">- Juru bicara tim Luthfi-Yasin, Heru Widodo, menyebut tim hukum Luthfi-Yasin mendaftarkan sebagai pihak terkait untuk membela kepentingan hukum di MK. Untuk diketahui, Andika-Hendi mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pilkada (PHP) 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Rabu (11/12).- Heru mengatakan pihak Luthfi-Yasin ingin meluruskan dalil yang disampaikan oleh pasangan Andika-Hendi. Heru menilai tidak ada pelanggaran yang dilakukan pasangan Luthfi-Yasin. Dalam petitumnya, Andika-Hendi meminta MK untuk membatalkan Keputusan KPU Jawa Tengah Nomor 200 Tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah.		



DAFTAR KAN PERMOHONAN: Paslon no urut 2 Luthfi-Yasin Ahmad Luthfi dan Taj Yasin, saat kampanye akbar di Solo.

○ Sengketa Pilgub Jateng 2024

Luthfi-Yasin Resmi Daftar Jadi Pihak Terkait

JAKARTA (Poskota) - Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah nomor urut 2 Ahmad Luthfi-Taj Yasin mendaftarkan permohonan sebagai pihak terkait ke Mahkamah Konstitusi (MK). Langkah ini terkait gugatan hasil Pilkada 2024 yang diajukan pasangan calon Andika Perkasa-Hendrar Prihadi (Hendi).

Juru bicara tim Luthfi-Yasin, Heru Widodo, menyebut tim hukum Luthfi-Yasin mendaftarkan sebagai pihak terkait untuk membela kepentingan hukum di MK.

"Jadi kami berkolaborasi dalam tim hukum Luthfi-Yasin pada kesempatan sore ini, setelah membaca informasi di website yang ternyata sudah diregister dengan perkara 263/PHPU. GUB-XXIII/2025, maka pasangan calon nomor urut 02 selaku pasangan yang menang dengan selisih lebih

dari 3,5 juta suara, berkepentingan untuk masuk membela kepentingan hukumnya di Mahkamah Konstitusi menjadi pihak terkait," kata Heru di Gedung MK, Jakarta Pusat, Jumat (3/1).

Heru mengatakan pihak Luthfi-Yasin ingin meluruskan dalil yang disampaikan oleh pasangan Andika-Hendi. Heru menilai tidak ada pelanggaran yang dilakukan pasangan Luthfi-Yasin.

"Kami meyakini itu tidak ada dan kami menyerahkan kepada Mahkamah permasalahan ini untuk diberikan pertimbangan. Sehingga nanti putusan Mahkamah bisa meluruskan apa yang selama ini beredar di tengah masyarakat," ujar Heru.

"Meluruskan hal-hal yang keliru, kami akan sampaikan berdasarkan fakta yang sebenarnya. Tidak ada keterlibatan yang dinamakan seperti itu, kemu-

dian tidak ada keterlibatan Kepala Desa sebagai mesin pemenang," imbuhnya.

Untuk diketahui, Andika-Hendi mengajukan permohonan perselisihan Hasil Pilkada (PHP) 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Rabu (11/12). Dalam petitumnya, Andika-Hendi meminta MK untuk membatalkan Keputusan KPU Jawa Tengah Nomor 200 Tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah.

Sebagai informasi, KPU Jateng telah mengumumkan hasil rekapitulasi suara Pilkada Jateng 2024. Hasilnya pasangan nomor urut 1 Andika Perkasa-Hendrar Prihadi mendapatkan 7.870.084 suara (40,86%), sementara pasangan nomor urut 2 Ahmad Luthfi-Taj Yasin mendapatkan 11.390.191 suara (59,14%). (ham)